

Analisis disparitas pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (segi ekonomi dan non ekonomi)

Erni Safitri*; Junaidi; Erfit

Prodi Magister Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Jambi

**E-mail korespodensi : ernisafitri.skm@gmail.com*

Abstract

This study aims to: (1) analyze the level of development inequality in districts/cities in Jambi Province. (2) analyze the factors that influence the level of development inequality from an economic and non-economic perspective between regencies/cities in Jambi Province. (3) Analyze the government's policies to overcome the inequality problem in Jambi Province. Based on the research results, (1) The average level of development inequality between districts/cities in Jambi Province is 0.18, lower than the rate of inequality in Indonesia. The province that is almost close to a high level of inequality is Kota Sungai Penuh, which is 0.49 points. At the same time, the smallest is Sarolangun Regency, which is 0.01. (2) From an economic perspective, the variables that significantly affect development inequality are balancing funds and investment, while the variable economic growth has no significant effect. From a non-economic perspective, only the human development index significantly affects development inequality, while labor and poverty have no significant effect.

Keywords: *Development inequality, Economic growth, Balance funds*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan dari segi ekonomi dan non-ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. (3) menganalisis kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, (1) Rata-rata tingkat ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/kota di Provinsi Jambi adalah sebesar 0,18 angka lebih rendah dari angka ketimpangan di Indonesia. Provinsi yang hampir mendekati tingkat ketimpangan yang tinggi adalah Kota Sungai Penuh yaitu sebesar 0,49 angka. Sedangkan yang paling terkecil adalah Kabupaten Sarolangun yaitu sebesar 0,01. (2) Dari segi ekonomi variabel yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan adalah dana perimbangan dan investasi sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan. Dari segi non ekonomi hanya indeks pembangunan manusia yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan sedangkan tenaga kerja dan kemiskinan tidak berpengaruh signifikan.

Kata kunci : Ketimpangan pembangunan, Pertumbuhan ekonomi, Dana perimbangan

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses multidimensional dengan berbagai perubahan-perubahan mendasar pada aspek struktur, tingkah laku dan institusi sosial, di samping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ketimpangan, serta pemberantasan

kemiskinan. Tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan wilayah. Ketimpangan wilayah tersebut, terlihat dari fenomena adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju

Ketimpangan pembangunan antar daerah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing daerah. Perbedaan kemampuan suatu daerah juga akan menyebabkan terjadinya perbedaan dalam proses pembangunan. Karena itu tidak mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat daerah maju (*Development Region*) dan daerah terbelakang (*Underdevelopment Region*). Terjadinya ketimpangan antar daerah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah, karena itu aspek ketimpangan pembangunan antar daerah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah daerah.

Menurut Todaro (2006) proses pembangunan paling tidak memiliki tiga tujuan inti yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial. Selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan adalah menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran.

Salah satu indikator yang selalu dijadikan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi, karena variabel ini dapat mudah diukur secara kuantitatif. Ekonomi dikatakan tumbuh jika terdapat kenaikan pendapatan (total maupun individu) sebagai akibat meningkatnya Produk Domestik Bruto dengan mengabaikan kenaikan yang terjadi pada jumlah penduduk, tidak memandang apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak, apakah ketimpangan ekonomi (antar wilayah, masyarakat, dan antarsektor) menurun.

Dalam penelitian ini, ketimpangan dilihat dari segi ekonomi dan non-ekonomi, dimaksudkan untuk menghitung seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi Jambi apabila dilihat dari segi ekonomi dan non-ekonomi. Adapun variabel yang termasuk dalam segi ekonomi adalah pertumbuhan penduduk, dana perimbangan dan investasi sedangkan dari segi non-ekonomi adalah indeks pembangunan manusia (IPM), tenaga kerja dan kemiskinan.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2012 – 2018. Data bersumber dari BPS Provinsi Jambi, BPS kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, Bappeda Provinsi Jambi dan Bappeda kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.

Penelitian ini menggunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif naratif dengan menggunakan data sekunder dikarenakan penelitian ini bersifat menggambarkan, menghitung, menguraikan, serta menarasikan dalam bentuk naskah hasil penelitian tersebut.

Alat analisis

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2012-2018. Alat analisis yang digunakan adalah Indeks Williamson, yaitu dengan formulasi sebagai berikut:

$$I_w = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - \bar{Y})^2(f_1 : n)}}{\bar{Y}}$$

Keterangan:

I_w = Indeks Williamson

Y_i = PDRB per kapita daerah i (Kabupaten/Kota)

Y = PDRB per kapita rata-rata Provinsi

F_i = Jumlah penduduk daerah i (Kabupaten/Kota)

n = Jumlah penduduk seluruh Provinsi

Nilai Indeks Williamson berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 0, semakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi dan semakin mendekati angka 1, semakin melebar ketimpangan pembangunan ekonomi.

Metode analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab tujuan penelitian kedua yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan dari segi ekonomi dan non-ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, dengan menggunakan analisis regresi data panel dari persamaan sebagai berikut:

$$KP_{it} = \beta_0 + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 DP_{it} + \beta_3 INV_{it} + \beta_4 IPM_{it} + \beta_5 TK_{it} + \beta_6 KM_{it} + e$$

Dimana :

KP = Ketimpangan pembangunan

X_1 = Pertumbuhan ekonomi

X_2 = Dana perimbangan

X_3 = Investasi (PMDN)

X_4 = Indeks pembangunan manusia (IPM)

X_5 = Tenaga kerja

X_6 = Kemiskinan

i = Jumlah observasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi => 11

t = Tahun data observasi (Tahun/deret waktu) => 7 tahun

β_0 = Konstanta

β_i = Koefisien (banyaknya peubah bebas) => 1,2,3

e = Komponen *error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat ketimpangan pembangunan suatu daerah besar maupun kecil memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan pada daerah tersebut. Ketimpangan pembangunan daerah antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi diberikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada Tahun 2012-2018

No	Provinsi	Indeks Wiliamson(%)							Rata-rata (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Kerinci	0,09	0,08	0,06	0,13	0,03	0,02	0,01	0,06
2	Merangin	0,17	0,17	0,16	0,25	0,15	0,15	0,12	0,16
3	Sarolangun	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,03	0,01	0,01
4	Batanghari	0,02	0,02	0,02	0,06	0,04	0,04	0,08	0,04
5	Muaro Jambi	0,10	0,11	0,18	0,20	0,10	0,11	0,08	0,12
6	Tanjab Timur	0,44	0,45	0,44	0,22	0,35	0,36	0,52	0,39
7	Tanjab Barat	0,35	0,34	0,32	0,13	0,26	0,27	0,42	0,29
8	Tebo	0,13	0,13	0,13	0,11	0,11	0,12	0,09	0,11
9	Bungo	0,08	0,09	0,09	0,19	0,09	0,09	0,06	0,09
10	Kota Jambi	0,26	0,26	0,25	0,34	0,23	0,24	0,20	0,25
11	Kota Sungai Penuh	0,43	0,44	0,45	0,37	0,55	0,55	0,68	0,49
Rata-rata									0,18

Sumber : Data diolah, 2020

Ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada tahun 2012-2018, relatif bervariasi. Ketimpangan tertinggi terlihat di Kota Sungai Penuh sebesar 0,49 sedangkan yang terendah di Kabupaten Sarolangun sebesar 0,01. Variasi ketimpangan pembangunan masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi disebabkan perbedaan pertumbuhan dan pendapatan perkapita masing-masing daerah.

Analisis regresi data panel

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan dari segi ekonomi dan non-ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada tahun 2012-2018. Alat analisis yang digunakan adalah data panel dengan metode analisis regresi berganda dibantu dengan dukungan program statistik komputer Eviews 9.0. hasil pengolahan data yang akan ditampilkan nantinya dianggap merupakan hasil estimasi terbaik karena dapat memenuhi kriteria ekonomi statistik maupun ekonometrik, hasil estimasi diharapkan akan menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

Analisis regresi yang dilakukan terhadap estimasi ketimpangan pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi menjadi variabel terikat (*dependent*), dan sebagai variabel bebasnya (*independent*) adalah pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana perimbangan, investasi, indeks pembangunan manusia, tenaga kerja dan kemiskinan, maka model regresinya data panel yang terdiri atas tiga pendekatan yaitu model Pooled Least Squares, model *fixed effect* dan model *random effect*.

Estimasi dengan model FEM

Berikut ini hasil dari model metode FEM pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana perimbangan, investasi, indeks pembangunan manusia, tenaga kerja dan kemiskinan terhadap ketimpangan pembangunan di Kab/Kota Provinsi Jambi pada tahun 2012-2018.

Tabel 2. Hasil estimasi dengan model FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.911502	0.674746	-1.350882	0.1818
PE?	0.001048	0.006328	0.165578	0.8690
DP?	-2.25E-10	1.22E-10	-1.840700	0.0706
INV?	-3.79E-09	2.11E-09	-1.794874	0.0777
IPM?	0.020391	0.011019	1.850537	0.0692
TK?	-4.01E-07	6.14E-07	-0.653292	0.5161
JPM?	2.12E-06	4.84E-06	0.437429	0.6634
Fixed Effects (Cross)				
_KERINCI--C	-0.198892			
_MERANGIN--C	0.037748			
_SAROLANGUN--C	-0.183902			
_BATANGHARI--C	-0.154954			
_MUAROJAMBI--C	-0.021816			
_TANJABTIM--C	0.354233			
_TANJABBAR--C	0.263251			
_TEBO--C	-0.069946			
_BUNGO--C	-0.117175			
_KOTAJAMBI--C	0.044573			
_KOTSUPEN--C	0.046880			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.903450	Mean dependent var	0.186883	
Adjusted R-squared	0.877703	S.D. dependent var	0.159169	
S.E. of regression	0.055663	Akaike info criterion	-2.746900	
Sum squared resid	0.185903	Schwarz criterion	-2.229436	
Log likelihood	122.7556	Hannan-Quinn criter.	-2.539919	
F-statistic	35.08984	Durbin-Watson stat	1.759038	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data diolah, 2020

Koefisien determinasi

Nilai R square = 0.903 dapat diartikan besarnya pertumbuhan ekonomi, dana perimbangan, investasi, indeks pembangunan manusia, tenaga kerja dan kemiskinan mampu mempengaruhi ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2012-2018 sebesar 90,3 persen sedangkan 9,7 persen di pengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksud dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependent. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *Significance level* 0.05 ($\alpha = 5\%$). Untuk menguji signifikansi pertumbuhan ekonomi, dana perimbangan, investasi, indeks pembangunan manusia, tenaga kerja dan kemiskinan terhadap ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2012-2018 secara simultan digunakan alat uji statistik F. Dengan nilai Prob (F Statistik) $0.000 < 0.05$. berarti H_0 ditolak dan menerima H_a , yang artinya uji secara bersama sama menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, dana perimbangan, investasi, indeks pembangunan manusia,

tenaga kerja dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2012-2018

Uji t

Untuk menguji signifikansi pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana perimbangan, investasi, indeks pembangunan manusia, tenaga kerja dan kemiskinan terhadap ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2012-2018. Uji t Statistik berguna untuk melihat besarnya pengaruh masing masing variabel Independen terhadap variabel dependen.

Nilai Prob. pertumbuhan ekonomi sebesar 0.8690 Prob > 0,05 maka Ho diterima dan ditolak Ha. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Hal ini terjadi dikarenakan berdasarkan dari pandangan ekonom Neo Klasik yang memperkenalkan Hipotesis Kuznets mengenai keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan memiliki keterkaitan seperti huruf U terbalik, yaitu ketika pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk dan akan mengalami penurunan, namun pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan membaik dan akan mengalami kenaikan.

Tidak signifikannya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan ini sejalan dengan temuan penelitian Berliantiya (2017) dan (Binatli,2012). Namun temuan penelitian ini berbeda dengan Yusika dkk (2018), Cingano (2014) dan Ali (2014) yang menemukan pengaruh negatif pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan, dan Kurniawan & Sugiyanto (2013), Chamber (2010), Wahiba & El Weriemmi (2014), Rubin & Segal (2015) dan Wei, dkk (2017) yang menemukan hubungan positif pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan.

Prob. dana perimbangan sebesar 0.0706 Prob < 0,10 maka Ho ditolak dan diterima Ha. Ini menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2012-2018, hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan yang diturunkan ke pada daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sudah sesuai tepat sasaran yang akhirnya akan menurunkan angka ketimpangan yang ada.

Prob. dari investasi sebesar 0.0777 Prob < 0,10 maka Ho ditolak dan diterima Ha. Ini menunjukkan bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2012-2018, hal ini berarti dengan meningkatnya investasi maka ketimpangan pembangunan akan menurun, Di daerah yang berkembang, meningkatnya permintaan akan mendorong pendapatan dan permintaan, yang selanjutnya menaikkan investasi. Permintaan modal untuk investasi cenderung rendah pada daerah-daerah perkembangan yang lambat. Hal ini disebabkan rendahnya penawaran modal dan pendapatan di daerah tersebut. Perbedaan perkembangan tersebut dan terkonsentrasinya investasi di daerah yang maju mengakibatkan terjadinya ketimpangan atau bertambahnya ketidakmerataan.

Pengaruh negatif investasi terhadap ketimpangan pembangunan ini mendukung temuan penelitian Sucihati (2014). Namun demikian, temuan ini berbeda dengan temuan Wei, dkk (2017) yang menunjukkan adanya pengaruh positif dari investasi terhadap ketimpangan pembangunan.

Prob. indeks pembangunan manusia sebesar 0.0692 Prob < 0,10 maka Ho ditolak dan diterima Ha. Ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2012-2018, hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia di suatu daerah maka kualitas sumber daya manusianya akan meningkat juga dengan begitu akhirnya bisa meningkatkan pendapatan serta

nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta akan menurunkan ketimpangan. Pengaruh positif indeks pembangunan manusia sejalan dengan temuan Dian & Pujiati (2016), namun berbeda dengan temuan Samsir & Rahman (2018) yang menunjukkan pengaruh negatif indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pembangunan.

Prob. tenaga kerja sebesar 0.5161 Prob > 0,05 maka H_0 diterima dan ditolak H_a . Ini menunjukkan bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2012-2018. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja disuatu wilayah tidak merata kualitas pendidikannya serta kurangnya skill atau kemampuan mereka dengan begitu pendapatan mereka akan menurun serta berbeda pendapatannya dengan tenaga kerja yang memiliki kemampuan serta skill yang bagus akhirnya akan menimbulkan ketimpangan. Temuan ini berbeda dengan temuan Rosmeli (2015) yang menunjukkan adanya pengaruh positif tenaga kerja terhadap ketimpangan pembangunan.

Prob. kemiskinan sebesar 0.6634 Prob > 0,05 maka H_0 diterima dan ditolak H_a . Ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2012-2018, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya atau meningkatnya angka kemiskinan di suatu daerah akan menimbulkan ketimpangan antar daerah dikarenakan masih banyaknya di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi belum menamatkan sekolahnya serta tidak mengasah keterampilan atau skill yang nantinya akan dengan adanya skill serta kualitas sumber daya manusianya bagus akan meningkatkan pendapatan akhirnya kemiskinan akan menurun dan ketimpangan pembangunan antar daerah pun akan menurun.

Tidak signifikannya pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pembangunan sejalan dengan temuan Mahakso (2013). Namun demikian temuan ini berbeda dengan Pangkiro, dkk (2016) yang menunjukkan adanya pengaruh positif kemiskinan terhadap ketimpangan pembangunan.

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan di Provinsi Jambi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan. Ketimpangan pembangunan di Jambi dapat berkurang seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi yang merata. Maka dari itu, diharapkan adanya kebijakan yang ditujukan untuk dapat menciptakan pemerataan daerah. Misalnya, memaksimalkan peranan desentralisasi fiskal untuk melakukan fungsinya secara efektif dan efisien, sehingga pemerintah daerah mampu meningkatkan kapasitas fiskalnya melalui pengembangan aktivitas ekonomi dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.

Dana perimbangan berpengaruh terhadap ketimpangan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Pemerintah daerah diharapkan mampu mengevaluasi kembali pemberian DAU dan DAK serta DBH kepada daerah dengan meninjau alokasi dasar yaitu kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Bagi daerah yang relatif tertinggal, miskin akan sumber daya alam dan memiliki kemampuan keuangan yang rendah maka melalui besarnya DAU, DAK dan DBH yang merupakan bantuan dana dari pusat akan dapat menciptakan pemerataan pembangunan antar daerah sehingga daerah tetap dapat pula membangun dan berkembang seiring dengan daerah-daerah lain yang berkembang cepat. Proporsi DAU, DAK dan DBH diharapkan lebih dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan publik dari pada dimanfaatkan untuk pengeluaran; rutin. Hal ini lah yang dapat mengurangi adanya ketimpangan pendapatan antar daerah.

Investasi berpengaruh terhadap ketimpangan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Untuk menurunkan ketimpangan antar provinsi tersebut diperlukan adanya kerja sama antar daerah. Daerah maju dapat memberikan transfer modal dan fasilitas penunjang yang nantinya dapat digunakan untuk lebih memajukan daerah yang

tergolong maju tetapi tertekan dan daerah yang relatif terbelakang. Hal tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan pengeluaran produktif seperti pembangunan kawasan usaha yang strategis guna meningkatkan jumlah investasi sebagai modal pembangunan dan menjalin kerjasama dengan pihak eksternal untuk kelancaran terkait aktivitas ekonomi. Menggali dan mengembangkan potensialitas daerah yang masih belum maksimal. Dengan begitu para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut.

IPM berpengaruh terhadap ketimpangan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Ketimpangan pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dapat berkurang seiring peningkatan dan perluasan akses modal atau investasi sekaligus kesempatan kerja. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendorong meningkatnya sektor riil yang berorientasi masyarakat menengah kebawah seperti UMKM yang potensial sesuai dengan karakteristik daerah, pembangunan sarana prasarana penunjang perekonomian pada daerah tertinggal dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat dengan begitu akan menurunkan ketimpangan.

Tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Dengan melihat ketimpangan yang terjadi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dapat diharapkan ada campur tangan atau kebijakan pemerintah untuk mengembangkan kualitas dan produktifitas baik SDM maupun SDA sehingga pembangunan lebih adil dan merata. Pemerintah daerah masing-masing kabupaten/kota perlu melakukan berbagai upaya yang sistematis dan terstruktur untuk meningkatkan produktifitas sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan begitu akan menurunkan tingkat ketimpangan antara daerah yang ada di Provinsi Jambi.

Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk melakukan penanggulangan pengurangan kemiskinan untuk mengatasi ketimpangan. Kemudian menggerakkan sektor-sektor perekonomian agar lebih banyak memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan peningkatan dari segi pendapatan dan nantinya akan mengurangi ketimpangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rata-rata tingkat ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi adalah sebesar 0,18 angka lebih rendah dari angka ketimpangan di Indonesia. Provinsi yang hampir mendekati tingkat ketimpangan yang tinggi adalah Kota Sungai Penuh yaitu sebesar 0,49 angka. Sedangkan yang paling terkecil adalah Kabupaten Sarolangun yaitu sebesar 0,01. Berdasarkan dari hasil penelitian terlihat bahwa dari segi ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan adalah variabel dana perimbangan dan investasi sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari segi non ekonomi hanya indeks pembangunan manusia yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan sedangkan tenaga kerja dan kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Kebijakan yang bisa lakukan pemerintah daerah Provinsi Jambi yaitu dengan pemerataan investasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dari segi pendidikannya, mengoptimalkan dari segi dana perimbangannya yang harus sesuai dengan koridornya agar nantinya bisa mengurangi ketimpangan dan meningkatkan perekonomian.

Saran

Pemerintah daerah perlu meningkatkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan meningkatkan pembangunan manusia seperti kualitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya pembangunan manusia secara merata diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Dilihat dari hasil regresi terlihat pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pembangunan dengan hasil tersebut diharapkan dapat dilakukannya peningkatan pendapatan per kapita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa selalu diharapkan, maka untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan, kepada pemerintah dianjurkan untuk memberikan subsidi lebih banyak kepada masyarakat secara langsung berupa “pembayaran transfer”, dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S. (2014). Inflation, income inequality and economic growth in Pakistan: A cointegration analysis. *International Journal of Economic Practices and Theories*, 4(1), 33-42
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi pembangunan edisi kelima*, UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Berlianantiya, M. (2017). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Timur. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 5(2), 163 - 171
- Binatli, A.O.(2012). Growth and income inequality: a comparative analysis. *Economics Research International*, Article ID 569890
- Chambers, D. (2010). Does arising tiderai seall ships? The impact of growth on inequality. *Applied Economics Letters*, 17(6), 581–586
- Cingano, F. (2014). *Trends in income inequality and its impact on economic growth*. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No.163.
- Damanik.A.M, & Z Zulgani, R Rosmeli. (2018).Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. e-*Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* 7 (1), 15-25
- Didia, K.A. (2016). Analisis Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Kedungsepur. *Economics Developemnt Analysis Journal (EDAJ)*, 5(1), 101-108.
- Jhingan, M. L. (2003). *Ekonomi pembangunan dan perekonomian*, PT. Raya Grafindo Persada: Jakarta
- Juanda, B. & Junaidi. (2012). *Ekonometrika deret waktu: teori dan aplikasi*, IPB Press: Bogor
- Kuncoro, M. (2010). *Dasar-dasar ekonomika pembangunan*, UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Kurniawan, B.R. A. & Sugiyanto, FX. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Share Sektor Industri dan Pertanian Serta Tingkat Jumlah Orang Yang Bekerja terhadap Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2002-2010. *Jurnal Ekonomi*, 2(1), 1-14.
- Lubis, F.K.. (2016). *Analisis ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1990-2013*, Tesis Universitas Sumatera Utara: Medan.
- Lusiana, N. D. (2008). *Analisis kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung Tahun 1996 – 2005*. Tesis Universitas Indonesia: Depok.

- Mahakso, W. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah Diprovinsi Jambi 2003-2010*. [Tesis]. Universitas Gadjah Mada
- Pangkiro, H. A.K. (2016). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(1), 339-351
- Rahmadi.S., & P Parmadi. (2019). Pengaruh ketimpangan pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi antar pulau di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika* 14 (2), 55-66
- Rosmeli. (2015). Dampak Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 10(2), 362-369
- Rubin, A. & Segal, D.(2015).The effects of economic growth on income inequality in the US. *Journal of Macroeconomics*, 45, 258–273
- Samsir, A. & Rahman, A. (2018). Menelusur Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten dan Kota. *Jurnal EcceS (Economics, Social, and Development Studies)* 5(1), 23-42
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi wilayah dan perkotaan*, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Sucihati, H. (2014). Pengaruh Kenaikan Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 4(1)
- Sulistyo, R. A. (2017). *Analisis ketimpangan ekonomi antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta (Tahun 2012-2016)*. Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Todaro, M. P., Stephen C. & Smith. (2011). *Pembangunan ekonomi edisi 11*. Erlangga: Jakarta.
- Urrahman, A. (2012). Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2006-2010. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1(1)
- Wahiba, N.F. & El-Weriemmi,M. (2014).The relationship between economic growth and income inequality. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 4(1), 135–143
- Wei, K., Yao, S. & Liu, A. (2007). Foreign direct investment and regional inequality in China. *Review of Development Economics*, 13(4), 778-791.
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika pengantar dan aplikasinya*. Edisi Ketiga. Ekonisia: Yogyakarta.
- Yusika, L.V., Malik, N. & Arifin, Z. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 230-240.